

DAMPAK PERUBAHAN KURIKULUM TERHADAP PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERSKALA PRIORITAS DI SMK NEGERI 4 PENAJAM PASER UTARA: PELUANG DAN TANTANGAN

**Sri Wahyuni¹, Anita Dwi Basuki², Suharman³, Widyatmike Gede Mulawarman⁴,
Masrur Yahya⁵**

Pendidikan Masyarakat, Universitas Mulawarman¹, SMKN 4 Penajam Paser Utara², BPMP
Provinsi Kalimantan Timur³, Universitas Mulawarman⁴, Universitas Mulawarman⁵
pos-el: sri.wahyuni@fkip.unmul.ac.id¹, anitabasuki46@guru.smk.belajar.id²,
armandsuharman75@gmail.com³, widyatmike@fkip.unmul.ac.id⁴, masruryahyaalwi@gmail.com⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak perubahan kurikulum dari Kurikulum Merdeka menuju Kurikulum Deep Learning terhadap manajemen pembiayaan pendidikan di SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara. Perubahan kurikulum menuntut penyesuaian sistem pengelolaan keuangan sekolah agar mampu mendukung inovasi pembelajaran yang berbasis kompetensi mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen keuangan sekolah, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi, penyajian, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kurikulum belum berpengaruh langsung terhadap mekanisme pengelolaan dana karena sekolah masih berpedoman pada regulasi nasional yang ketat. Namun, transisi ini membuka peluang efisiensi dan inovasi pembiayaan melalui alokasi cadangan dana untuk pengembangan guru, pelaksanaan pelatihan berjenjang, serta kemitraan dengan industri. Tantangan utama yang muncul meliputi keterbatasan fleksibilitas anggaran, akuntabilitas pelaporan, dan pemerataan mutu pelatihan. Penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola keuangan sekolah yang adaptif, transparan, dan berbasis prioritas agar dapat menghadapi dinamika perubahan kurikulum secara berkelanjutan.

Kata kunci : perubahan kurikulum, pembiayaan pendidikan, manajemen keuangan sekolah, peluang, tantangan

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of changing the curriculum from the Independent Curriculum to the Deep Learning Curriculum on the management of education financing at SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara. Curriculum changes require adjustments to the school financial management system to be able to support learning innovations based on deep competencies. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data was collected through in-depth interviews, observations, and analysis of school financial documents, then analyzed using Miles and Huberman's interactive model which included reduction, presentation, and conclusion drawing and verification. The results of the study show that the change in curriculum has not had a direct effect on the fund management mechanism because schools are still guided by strict national regulations. However, this transition opens up opportunities for financing efficiency and innovation through the allocation of reserve funds for teacher development, the implementation of tiered training, and partnerships with industry. The main challenges that arise include limited budget flexibility, reporting accountability, and equitable distribution of training quality. This research emphasizes the importance of adaptive, transparent, and priority-based school financial governance in order to be able to deal with the dynamics of curriculum change in a sustainable manner.

Keywords: *curriculum change, education financing, school financial management, opportunities, challenges*

1. PENDAHULUAN

Perubahan kurikulum di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pendidikan dan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan zaman. Pada tahun ajaran 2025/2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkan adopsi pendekatan pembelajaran baru yang dikenal dengan *Deep Learning* (pembelajaran mendalam) sebagai penguatan kurikulum nasional. Pendekatan ini tidak menggantikan kurikulum yang sudah ada, melainkan memperkaya penerapan Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 (K-13) dengan penekanan pada pembelajaran bermakna, reflektif, dan berbasis nilai (Haditsa, HQ, Isnani, IR, Harsing, H., Supiana, S., & Qiqi, 2025). Sekolah dapat tetap menggunakan kurikulum yang berlaku, namun diharapkan mengintegrasikan prinsip pembelajaran mendalam secara bertahap.

Kebijakan nasional tersebut menargetkan implementasi pendekatan *deep learning* secara menyeluruh di 80-100 persen sekolah pada rentang tahun 2028 hingga 2030, menjadikannya sebagai salah satu reformasi pembelajaran terbesar dalam satu dekade terakhir. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman esensial, makna, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi daripada sekadar penguasaan materi. Perubahan paradigma ini membawa konsekuensi sistemik, terutama pada aspek manajemen pengalokasian dana sekolah, karena menuntut penyesuaian terhadap kebutuhan infrastruktur digital, pelatihan guru, dan pengembangan perangkat ajar baru.

Dalam konteks tersebut, SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara sebagai salah satu lembaga pendidikan menengah kejuruan di Kalimantan Timur, tengah menghadapi masa transisi implementasi

kebijakan ini. Sekolah tersebut menjadi representasi menarik untuk dikaji karena sedang berupaya menyesuaikan sistem pengelolaan keuangannya dengan kebutuhan pembelajaran mendalam yang menuntut sumber daya lebih intensif. Transisi ini menuntut perubahan dalam strategi perencanaan dan pengalokasian dana, agar tetap efisien namun mampu mendukung inovasi pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi mendalam dan proyek kejuruan berbasis praktik kerja.

Hasil-hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kurikulum baru sangat bergantung pada kesiapan finansial dan manajerial lembaga pendidikan. (Zickafoose et al., 2024) menemukan bahwa keterbatasan pendanaan menjadi faktor utama yang menghambat reformasi kurikulum di negara-negara berkembang. Sementara itu, (Wolff et al., 2025) menekankan pentingnya integrasi antara inovasi pembelajaran dan strategi pembiayaan yang terencana agar tidak menimbulkan beban tambahan bagi institusi pendidikan. Kondisi serupa dapat ditemukan di SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara, di mana proses transisi menuju pembelajaran mendalam memerlukan alokasi dana tambahan untuk mendukung pelatihan guru, pemutakhiran peralatan praktik, serta integrasi teknologi digital dalam proses belajar mengajar.

Penelitian-penelitian terdahulu di Indonesia menunjukkan keterkaitan erat antara manajemen dana dan mutu pendidikan. (Mahputriono, 2022) menegaskan bahwa pengelolaan dana yang efektif berkontribusi pada peningkatan kualitas lulusan, sedangkan (Findiana & Bahar, 2023) menyoroti pentingnya diversifikasi sumber pendanaan melalui pendekatan kurikulum berbasis kewirausahaan. Namun, kajian yang mengaitkan perubahan pendekatan kurikulum nasional dengan dinamika

pengelolaan keuangan di tingkat sekolah menengah kejuruan masih sangat terbatas. Terlebih, konteks SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara yang sedang menavigasi masa transisi kebijakan pembelajaran mendalam menjadi representasi konkret bagaimana perubahan paradigma pendidikan berdampak langsung pada manajemen pendanaan di tingkat mikro.

Penelitian ini menawarkan kebaharuan yang terletak pada fokusnya yang spesifik dan kontekstual, yaitu mengkaji dampak perubahan pendekatan kurikulum terhadap manajemen pengalokasian dana sekolah di satuan pendidikan vokasi pada masa transisi nasional menuju kurikulum *deep learning*. Tidak banyak penelitian sebelumnya yang menelaah bagaimana lembaga pendidikan menengah kejuruan di daerah mengadaptasi sistem penganggaran mereka terhadap tuntutan pembelajaran mendalam, baik dari sisi strategi manajerial maupun kesiapan sumber daya. Penelitian ini berkontribusi secara ilmiah dengan menawarkan gambaran empiris mengenai tantangan dan strategi adaptif lembaga pendidikan dalam mengelola alokasi dana secara efisien di tengah reformasi kurikulum berbasis pendekatan baru.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efek perubahan kurikulum terhadap manajemen pengalokasian dana sekolah di SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada tiga aspek: (1) Manajemen pengelolaan dana selama masa transisi dari Kurikulum Merdeka menuju Kurikulum *Deep Learning*; (2) peluang inovasi dan efisiensi biaya yang muncul akibat perubahan kurikulum; (3) tantangan pembiayaan dan pemerataan akses pendidikan (4) dampak perubahan Kurikulum Terhadap Manajemen Pengalokasian Dana Sekolah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*) yang bertujuan menggali secara mendalam dinamika internal manajemen pengalokasian dana pada satuan pendidikan selama masa transisi kurikulum (Kurikulum Merdeka ke Kurikulum *Deep Learning*). Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena kontekstual secara intensif dalam keadaan alami dan memahami hubungan antara kebijakan kurikulum dan praktik pengelolaan keuangan di tingkat sekolah. Pendekatan studi kasus telah dianjurkan untuk penelitian pendidikan yang ingin menangkap kompleksitas proses implementasi kebijakan pada suatu unit kasus tertentu (Mtisi, 2022).

SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara dipilih secara purposive (*case purposive selection*) karena: (1) statusnya sebagai sekolah menengah kejuruan yang sedang menjalani masa transisi kurikulum nasional menuju pendekatan *deep learning* pada 2025/2026; (2) memiliki beragam program keahlian yang *menggambarkan* variasi kebutuhan pembiayaan; dan (3) menjadi representasi konteks daerah yang relevan untuk mengeksplorasi isu pembiayaan pendidikan berskala prioritas. Pemilihan studi kasus dalam penelitian kualitatif disukai karena kaya data memungkinkan penjelajahan faktor struktural dan praktik manajerial secara mendalam (Assyakurrohim et al., 2022). Pemilihan purposive semacam ini lazim dan direkomendasikan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informan yang memiliki pengalaman dan wawasan relevan terhadap fenomena yang diteliti. Informan kunci (*purposeful informants*) untuk menjamin triangulasi sumber dan kedalaman data, peneliti akan mewawancarai informan berikut: Kepala Sekolah (pengambil kebijakan dan penentu arah RKAS), Bendahara/Pejabat Keuangan Sekolah (pengelola teknis anggaran dan pelaporan), Wakil Kepala

Sekolah bidang kurikulum, guru perwakilan dari jurusan berbeda sebanyak 7 orang. Pendekatan ini mengikuti praktik purposive sampling dalam penelitian implementasi dan studi kasus. Jumlah dan komposisi informan ditentukan berdasarkan strategi purposive sampling sampai tercapai saturation (kejenuhan data) yakni ketika jawaban informan tidak lagi menghadirkan tema baru yang relevan untuk fokus penelitian (Lu et al., 2024).

Data dikumpulkan melalui: (1) wawancara semi-terstruktur mendalam (*in-depth interviews*), (2) observasi partisipatif/non-partisipatif terhadap proses pembelajaran dan administrasi keuangan, serta (3) analisis dokumen (RKAS, laporan realisasi anggaran, notulen rapat, catatan pelatihan, dan dokumen kebijakan sekolah). Kombinasi teknik ini meningkatkan kredibilitas temuan dan memungkinkan perbandingan data antar-sumber (*triangulasi sumber dan metode*) (Schlunegger et al., 2024). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang menekankan bahwa proses analisis data kualitatif bersifat siklis, dinamis, dan berlangsung terus-menerus sepanjang kegiatan penelitian. Model ini terdiri atas tiga komponen utama, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (Wahyuni & Destia Fahira, 2023). Ketiga komponen ini tidak berlangsung secara linier, melainkan saling berinteraksi dalam proses reflektif yang berulang hingga diperoleh temuan yang kredibel dan bermakna.

Reduksi data dilakukan sejak awal proses pengumpulan data hingga tahap analisis akhir. Semua hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang terkumpul dari SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara dibaca secara menyeluruh, kemudian diseleksi untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yakni efek perubahan

kurikulum terhadap pembiayaan pendidikan berskala prioritas. Tahap berikutnya adalah penyajian data (*data display*), yaitu menata hasil reduksi ke dalam bentuk yang terorganisasi untuk memudahkan interpretasi. Data dapat disajikan dalam bentuk matriks tematik, tabel, diagram naratif, serta kutipan wawancara kunci (Nurhaswinda et al., 2025). Penyajian data memungkinkan peneliti untuk melihat pola keterkaitan antar kategori, misalnya antara kebijakan penganggaran dengan tantangan implementasi *deep learning*.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Verifikasi dilakukan untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan. Cara yang umum digunakan adalah triangulasi, yaitu penggunaan berbagai sumber data, metode, teori, atau peneliti untuk menguji konsistensi dan memperkaya interpretasi (Donkoh, 2023). Proses ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan proposisi sementara hingga verifikasi melalui triangulasi sumber dan metode yang dipilih. Peneliti melakukan perbandingan silang (*cross-case checking*) antara hasil wawancara kepala sekolah, bendahara, dan guru, serta mengonfirmasi kesesuaian data dengan dokumen pendukung. Langkah ini sejalan dengan prinsip validitas menurut Miles dan Huberman, yaitu bahwa kesimpulan yang kuat harus dikonfirmasi melalui verifikasi yang berulang dari berbagai sumber dan waktu yang berbeda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil temuan penelitian di SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta analisis dokumen keuangan sekolah selama masa transisi kurikulum dari Kurikulum Merdeka menuju Kurikulum Deep Learning (2025–2026). Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan

hasil temuan ke dalam empat fokus utama penelitian.

a. Manajemen Pengelolaan Dana Selama Masa Transisi Kurikulum

Manajemen proses perencanaan dana melibatkan seluruh unsur manajemen sekolah. Pihak-pihak yang berperan di antaranya adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta para kepala jurusan keahlian. Sebelum anggaran ditetapkan, seluruh kebutuhan akan dianalisis secara menyeluruh agar perencanaan keuangan lebih tepat sasaran sekaligus akuntabel. Analisis tersebut mencakup penentuan prioritas, estimasi biaya, serta perhitungan manfaat yang dapat diperoleh siswa maupun sekolah. Penganggaran berbasis prioritas secara signifikan meningkatkan optimalisasi sumber daya pendidikan di sekolah (Fahlupi et al., 2024). Setelah perencanaan dan pengelolaan dana dilakukan, hasilnya akan ditampilkan dalam forum rapat dinas sekolah. Langkah ini merupakan bentuk transparansi, di mana seluruh guru dan tenaga kependidikan di SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara dapat mengetahui bagaimana dana digunakan serta sejauh mana alokasi anggaran mendukung program sekolah. Seperti yang ditulis (Sovita & Rosa, 2022) dengan sistem seperti ini, diharapkan tercipta budaya pengelolaan keuangan yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak.

SMKN 4 Penajam Paser Utara memperoleh sumber pembiayaan utama dari Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Dengan adanya anggaran yang bersumber dari BOSNAS dan BOSDA, SMKN 4 Penajam Paser Utara dapat mengoptimalkan berbagai kegiatan pendidikan yang meliputi aspek akademik dan nonakademik. Kedua sumber dana ini memiliki peran strategis karena menjadi pondasi dalam menopang jalannya program-program sekolah, mulai dari

kebutuhan rutin operasional hingga pengembangan kegiatan yang bersifat inovatif yang ada di SMKN 4 Penajam Paser utara. Kolaborasi kedua sumber pendanaan ini sejalan dengan penelitian (Putri Nadia, Amelia Anwar, 2024) bahwa kombinasi berbagai sumber pendanaan memungkinkan sekolah mengalokasikan dana tidak hanya pada kegiatan akademik seperti sarana belajar dan peningkatan kompetensi guru, tetapi juga pada kegiatan non-akademik seperti kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan karakter. Begitu juga dengan penelitian (Adnyani & Astawa, 2023) bahwa sistem pengelolaan dana BOS dan BOSDA harus berpedoman pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) agar setiap pengeluaran selaras dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan. BOSNAS (Bantuan Operasional Sekolah Nasional) memainkan peran dalam memberikan jaminan keberlangsungan standar pelayanan minimal dalam khususnya di SMK N Penajam Paser Utara. Ini sejalan dengan hasil penelitian (Soro & Ambarawati, 2025) yang menemukan bahwa dana BOS yang dikelola dengan partisipatif dan akuntabel mendukung penyediaan media pembelajaran digital, pemeliharaan sarana, dan peningkatan kompetensi guru. Sementara BOSDA hadir sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah. Realisasi dana BOSNAS dan BOSDA yang sesuai regulasi berdampak positif terhadap kinerja keuangan sekolah, termasuk pencapaian sasaran layanan pendidikan yang lebih baik (Lutfi Zulfikar, 2023).

Terkait dengan pengelolaan pembiayaan dan belanja sekolah, di SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara mengelompokkan jenis belanja atau pengelolaan keuangan ke dalam tiga kategori utama. Pertama adalah belanja barang dan jasa, yaitu pengeluaran yang dialokasikan untuk kebutuhan operasional

sekolah sehari-hari agar seluruh aktivitas pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Kedua adalah belanja modal peralatan dan mesin, yang difokuskan pada pengadaan sarana praktik kejuruan dan teknologi penunjang agar siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan standar kompetensi industri. Ketiga adalah belanja modal aset tetap lainnya, yang lebih diarahkan untuk pembangunan atau pemeliharaan fasilitas fisik sekolah dalam jangka panjang, seperti ruang kelas, laboratorium, atau infrastruktur penunjang lainnya. Dari ketiga kelompok belanja tersebut, porsi terbesar dialokasikan pada belanja barang dan jasa. Hal ini dapat dipahami karena pos anggaran ini mencakup banyak kegiatan langsung yang memberikan manfaat nyata bagi siswa maupun guru. Dana dalam kategori ini digunakan untuk membiayai kegiatan ekstrakurikuler, kebutuhan listrik, air, serta akses internet yang menjadi penunjang utama proses belajar. Selain itu, belanja barang dan jasa juga mendukung penyediaan peralatan praktik yang digunakan siswa di bengkel atau laboratorium, serta menghadirkan guru tamu dari dunia industri untuk memperkaya wawasan peserta didik. Dengan alokasi yang lebih besar pada belanja barang dan jasa, SMK N 4 Penajam Paser Utara berupaya memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya berlangsung secara teoritis, tetapi juga praktis, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Berdasarkan teori dan bukti empiris tersebut maka dapat dikatakan bahwa BOSNAS dan BOSDA digunakan secara terencana untuk mendukung prioritas pendidikan akademik dan non-akademik di SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara dapat dianggap sebagai praktik yang ideal dalam paradigma pembiayaan pendidikan berbasis prioritas. Ini menunjukkan bahwa sekolah tersebut tidak saja mengoptimalkan sumber daya yang ada, tetapi juga memperkuat standar pelayanan, kompetensi guru, dan

pengembangan karakter siswa, sesuai harapan teori efektivitas dan keadilan pendidikan. (Margiati et al., 2025) menjelaskan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan sekolah dipengaruhi oleh keterlibatan kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Selain itu, menurut (Mutu & Di, 2023) transparansi dan akuntabilitas menjadi indikator penting dalam memastikan bahwa dana pendidikan digunakan sesuai prioritas kebutuhan sekolah. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah yang baik akan meningkatkan efektivitas penggunaan dana serta kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan.

b. Peluang Inovasi dan Efisiensi Biaya Akibat Perubahan Kurikulum

Transisi Kurikulum membuka peluang inovasi pembiayaan dan efisiensi biaya melalui kolaborasi, pengembangan SDM, dan kemitraan industri. Temuan lapangan menunjukkan bahwa transisi kurikulum di SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara menciptakan peluang nyata untuk inovasi dalam pengelolaan pembiayaan sekolah dan efisiensi biaya diantaranya adalah: (1) pengalokasian cadangan dana hingga sekitar 25% untuk peningkatan kompetensi guru, (2) pelaksanaan *short-course* bagi guru yang selanjutnya diwajibkan menyebarluaskan (diseminasi) hasil pelatihan ke rekan sejawat, serta (3) kerja sama dengan industri mitra (CSR) untuk dukungan pelatihan dan penyediaan peralatan praktik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan bendahara, terdapat pengalokasian cadangan dana maksimal 25% dari total anggaran untuk peningkatan kompetensi guru di SMKN 4 Penajam Paser Utara. Sesuai dengan temuan (Harbes et al., 2024) bahwa alokasi dana khusus untuk pengembangan SDM juga direkomendasikan sebagai strategi utama dalam perencanaan

pendidikan adaptif. Dalam menghadapi perubahan kurikulum, SMKN 4 Penajam Paser Utara melaksanakan *program short course* bagi para guru. Guru yang telah menyelesaikan pelatihan tersebut kemudian diwajibkan untuk mendiseminasikan pengetahuan yang diperoleh kepada rekan sejawat. Strategi ini tidak hanya menjadi bentuk peluang efisiensi anggaran, tetapi juga memastikan pemerataan akses peningkatan kompetensi. Setiap guru SMKN 4 Penajam Paser Utara diberi kesempatan secara bergiliran untuk mengikuti program pelatihan. Hal ini sejalan dengan temuan (Rindawan et al., 2024) bahwa praktik pelatihan guru (kursus singkat) yang diikuti dengan diseminasi hasil pelatihan ke rekan sejawat terbukti meningkatkan kapasitas guru dan mempercepat penerapan inovasi pembelajaran.

Selain itu, kolaborasi dengan industri mitra kejuruan turut membuka peluang bagi SMKN 4 Penajam Paser Utara dalam menghadapi tantangan kurikulum. Dukungan melalui program CSR dari industri mitra juga memberikan manfaat besar, hal itu mencakup kegiatan pelatihan dan penyediaan alat pembelajaran yang menunjang proses pendidikan di SMKN 4 Penajam Paser Utara. Sejalan dengan (Harbes et al., 2024; Maya et al., 2021) bahwa kerja sama dengan mitra industri tidak hanya mendukung pembiayaan pelatihan dan penyediaan peralatan praktik, tetapi juga meningkatkan relevansi kriteria dengan kebutuhan dunia kerja. Lebih lanjut (Harbes et al., 2024) mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan industri dan pemanfaatan berbagai sumber dana (publik, swasta, CSR) mendukung program yang tidak diinginkan, memperkuat akuntabilitas, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inovatif.

Peluang efisiensi dan inovasi pembiayaan di SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara mencerminkan praktik tata

kelola adaptif, di mana sekolah berupaya merespons perubahan kebijakan kurikulum melalui pemanfaatan sumber daya internal dan eksternal secara kolaboratif. Selaras juga dengan (Fransen et al., 2024) menegaskan bahwa kombinasi kapabilitas internal (pemimpin yang responsif, sistem administrasi yang memadai) dan jejaring eksternal (industri, pemerintah daerah) memungkinkan inovasi penganggaran yang tetap sah secara regulatif.

c. Tantangan Pembiayaan dan Pemerataan Akses

Dalam masa transisi kurikulum di SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara tidak hanya membuka peluang efisiensi pembiayaan, tetapi juga memunculkan sejumlah tantangan baru dalam tata kelola keuangan dan pemerataan akses peningkatan kompetensi. Berdasarkan keterangan Kepala Sekolah dan Waka Bidang Kurikulum tantangan pertama berkaitan dengan pemerataan kualitas pelatihan muncul akibat belum adanya standar baku untuk modul *short-course* dan mekanisme pelatihan guru pelatih (*training of trainers*). Variasi dalam kualitas diseminasi menyebabkan ketimpangan kompetensi antar-guru dan antar program keahlian. Para guru perwakilan pada masing-masing jurusan menegaskan bahwa ketidakterpaduan modul dan mekanisme pelatihan guru pelatih (*training of trainers*) berdampak pada kesenjangan kompetensi di sekolah kejuruan. Hal ini terkait dengan temuan (Diah Kurniawati et al., 2025) bahwa pengembangan modul pelatihan menunjukkan bahwa ketersediaan modul yang relevan, efektif, dan terstandar sangat penting untuk mendukung peningkatan mutu kompetensi guru secara merata. Lebih lanjut dikatakan dalam temuannya (Nur Qolbi & Susiawati, 2025) bahwa kurikulum baru seperti kurikulum Merdeka memang menawarkan kelemahan dan peluang inovasi, namun implementasinya

menghadapi tantangan kesiapan tenaga pendidik dan kesenjangan pemahaman di berbagai wilayah. Tanpa standar yang jelas, pelatihan cenderung tidak konsisten dan hasilnya tidak merata

Kedua, dari sisi pembiayaan eksternal. Kepala Sekolah dan Bendahara menyampaikan bahwa tantangan keberlanjutan kemitraan industri masih belum tampak karena sebagian besar kerja sama CSR belum dituangkan dalam nota kesepahaman yang jelas. Tanpa dasar legal yang kuat, kontribusi mitra industri berpotensi tidak berkelanjutan, sehingga menimbulkan ketimpangan akses sumber daya antar jurusan. Kajian (Ramadhani & Rahayu, 2021) menemukan bahwa efektivitas program CSR pendidikan sangat bergantung pada mekanisme kontraktual dan kesesuaian program dengan kebutuhan kurikulum sekolah.

Ketiga, tantangan akuntabilitas. Dalam praktik pengelolaan keuangan, yang diterangkan oleh bendahara dan kepala sekolah bahwa SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara menerapkan pola realokasi anggaran secara situasional. Jika terdapat kebutuhan yang lebih mendesak, seperti perawatan bangunan atau perbaikan fasilitas, sebagian dana cadangan yang semula diperuntukkan bagi pelatihan guru dapat dialihkan untuk menutupi kebutuhan tersebut. Fenomena serupa juga terjadi pada pos anggaran humas yang kadang dipotong untuk kepentingan operasional prioritas. Pola semacam ini mencerminkan strategi adaptasi finansial sekolah terhadap keterbatasan sumber dana dan perubahan kebutuhan yang cepat. Namun, Waka Kurikulum dan para guru dibidang jurusan masing-masing mengakui bahwa dari sisi tata kelola keuangan, realokasi dana lintas pos juga menimbulkan tantangan akuntabilitas. Sejalan dengan temuan (Wulaningsih & Universitas, 2024) mengidentifikasi kendala utama berupa keterbatasan alokasi dana, transparansi pengelolaan anggaran, dan

kemampuan pengelola keuangan yang mempengaruhi kualitas pendidikan. (Musfirah et al., 2024) menemukan tantangan serupa dalam pengelolaan dana BOS, termasuk keterbatasan teknologi, kesiapan SDM, dan koordinasi dengan pihak eksternal, meskipun terdapat kesadaran yang kuat akan pentingnya akuntabilitas. Fleksibilitas anggaran perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan, dokumentasi, dan pelaporan yang ketat agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap juknis BOS. Dengan demikian, adaptasi finansial di SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara menunjukkan dua sisi yang kontradiktif: di satu sisi efisien dan responsif, tetapi di sisi lain menuntut tata kelola yang lebih transparan dan terstruktur.

Keempat, tantangan keberlanjutan mutu pelatihan terkait belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur. Waka Kurikulum dan para guru perwakilan jurusan menyatakan bahwa meskipun strategi diseminasi internal dinilai efisien, tanpa instrumen evaluasi yang jelas sulit untuk menilai dampak peningkatan kompetensi guru. Hal ini sejalan dengan temuan (Yamamoto & Zubaidah, 2021) bahwa pelatihan guru sering tidak diikuti tindak lanjut yang memadai, sehingga efektivitas pelatihan menjadi tidak terukur dan implementasi hasil pelatihan tidak terjamin. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan model pelatihan berjenjang bergantung pada keberlanjutan evaluasi pasca pelatihan.

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi pembiayaan belum otomatis menjamin pemerataan mutu dan keberlanjutan. Hal ini diungkap oleh (Nover et al., 2025) bahwa manajemen pembiayaan pendidikan memerlukan integrasi prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mengoptimalkan sumber daya keuangan untuk infrastruktur, staf pengajar, dan pengembangan kurikulum.

d. Dampak Perubahan Kurikulum terhadap Manajemen Pengalokasian Dana Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan kepala sekolah, bendahara, dan guru di SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara, ditemukan bahwa perubahan kurikulum belum memberikan pengaruh yang berarti terhadap pola manajemen pengalokasian dana sekolah. Mekanisme pengelolaan keuangan, khususnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), masih sepenuhnya berpedoman pada ketentuan regulatif yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ketentuan tersebut tertuang dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, yang secara ketat mengatur komposisi penggunaan dana BOS, sehingga ruang fleksibilitas sekolah dalam menyesuaikan anggaran terhadap kebutuhan pembelajaran menjadi terbatas. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Lutfi Zulfikar, 2023) yang menunjukkan bahwa fleksibilitas sekolah dalam penggunaan BOSNAS dan BOSDA dibatasi oleh regulasi pusat, sehingga perubahan kebijakan kurikulum hanya berpengaruh secara marginal terhadap pola pengelolaan dana di tingkat sekolah.

Secara administratif, perubahan ketentuan BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) tahun 2025 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 8 membawa konsekuensi terhadap komposisi belanja sekolah. Sebelumnya, sekolah diperbolehkan mengalokasikan hingga 50% dari total pagu BOS untuk honorarium guru dan tenaga kependidikan non-ASN, namun pada kebijakan terbaru porsi ini dibatasi maksimal 20%. Selain itu, sekolah diwajibkan mengalokasikan sedikitnya 10% dari total pagu BOS untuk pengadaan buku teks pelajaran dan ketentuan yang sebelumnya tidak diatur secara spesifik. Penyesuaian ini

mengubah pola prioritas belanja sekolah dari fleksibilitas operasional menuju kepatuhan terhadap standar input pembelajaran. Hal ini sejalan dengan penelitian (Intan & Zulkarnain, 2023) serta (Murni et al., 2023) yang menegaskan bahwa pengelolaan dana BOS di sekolah kejuruan belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan pembelajaran karena terhambat oleh ketentuan administratif dan akuntabilitas keuangan yang ketat. Sementara itu, (Maskur, 2023) menambahkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka hanya dapat berjalan efektif jika disertai sinkronisasi kebijakan pembiayaan yang fleksibel dan berbasis kebutuhan sekolah.

Dalam praktik lapangan, pengelolaan kegiatan pelatihan guru di SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara juga menyesuaikan dengan juknis BOS. Kegiatan pelatihan di lingkungan sekolah, seperti pelatihan internal dan lokakarya, dibiayai menggunakan dana BOS Reguler yang dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi kegiatan dan pembayaran honor narasumber. Sebaliknya, kegiatan pelatihan eksternal menggunakan dana BOSDA melalui mekanisme Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), yang pencairannya mengikuti ketersediaan dana daerah. Sekolah juga memanfaatkan sebagian dana BOS untuk pengadaan buku paket sesuai ketentuan kurikulum baru. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun kurikulum mengalami perubahan, manajemen pembiayaan sekolah tetap berpedoman pada regulasi nasional yang ketat. Dengan demikian, pengaruh perubahan kurikulum terhadap pengelolaan dana bersifat tidak langsung, karena keputusan alokasi lebih banyak ditentukan oleh kebijakan keuangan pusat dibandingkan kebutuhan pedagogis sekolah.

Temuan ini memperlihatkan kuatnya struktur regulasi yang membingkai praktik manajemen pembiayaan pendidikan di Indonesia. Dalam perspektif teori tata kelola adaptif,

sekolah berperan sebagai lembaga yang berupaya menyesuaikan kebijakan dan pengelolaan dana terhadap perubahan lingkungan regulatif yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Regulasi seperti Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tidak hanya menjadi pedoman teknis penggunaan dana, tetapi juga membentuk pola adaptasi kelembagaan dalam pengambilan keputusan anggaran di tingkat sekolah. Sejalan dengan hasil penelitian (Fernandes, 2018) bahwa sekolah beradaptasi dengan mandat kebijakan dengan menjaga keseimbangan sistem sambil menyesuaikan diri dengan kendala lingkungan. Akibatnya, perubahan kurikulum lebih banyak direspons secara administratif ketimbang substantif, karena ruang inovasi keuangan sekolah masih sangat terbatas. Kondisi ini juga ditemukan (Yadi et al., 2023) bahwa manajemen pembiayaan pendidikan memiliki tiga tahapan penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang harus diterapkan secara sistematis. Meski demikian, kepala sekolah dan bendahara di SMK Negeri 4 menunjukkan strategi manajemen adaptif dengan melakukan diferensiasi sumber pendanaan. Kegiatan pelatihan internal tetap dibiayai oleh BOS Reguler, sedangkan kegiatan eksternal diupayakan melalui BOSDA atau kerja sama dengan mitra industri. Strategi ini mencerminkan bentuk adaptasi institusional yang kreatif, di mana sekolah berupaya menyeimbangkan tuntutan regulatif dengan kebutuhan inovatif tanpa melanggar aturan.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum lebih berpengaruh pada pergeseran orientasi pengeluaran dibandingkan perubahan mekanisme manajemen dana secara fundamental. Sekolah tetap beroperasi dalam kerangka penganggaran nasional yang seragam, sementara adaptasi yang dilakukan bersifat administratif dan bertahap. Dengan demikian, hubungan antara

perubahan kurikulum dan manajemen pembiayaan bersifat tidak langsung, dan efektivitasnya sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan pusat memberi ruang fleksibilitas bagi sekolah untuk menyesuaikan kebijakan pembiayaan dengan konteks dan kebutuhan lokal.

4. KESIMPULAN

Perubahan kurikulum dari Kurikulum Merdeka menuju Kurikulum *Deep Learning* di SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara tidak secara langsung mengubah mekanisme manajemen pembiayaan sekolah. Meskipun terjadi pergeseran kebijakan kurikulum, pola pengelolaan dan pengalokasian dana tetap berpedoman pada regulasi nasional yang berlaku, khususnya melalui ketentuan Permendikdasmen tentang penggunaan dana BOS dan BOSDA. Sekolah lebih banyak menyesuaikan strategi pengelolaan keuangannya pada aspek administratif dan teknis tanpa melakukan perubahan substansial terhadap sistem penganggaran yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa masa transisi kurikulum justru membuka peluang inovasi dalam pengelolaan dana pendidikan. Melalui strategi pengalokasian cadangan dana untuk pengembangan kompetensi guru, pelaksanaan program pelatihan singkat (*short course*), serta kerja sama dengan mitra industri melalui program CSR, sekolah mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung keberlanjutan pembelajaran. Pola diseminasi hasil pelatihan antar guru menjadi bentuk efisiensi yang memperkuat pemerataan peningkatan kompetensi di lingkungan sekolah.

Namun demikian, transisi ini juga menghadirkan berbagai tantangan, terutama dalam hal akuntabilitas dan pemerataan mutu. Belum adanya standar modul pelatihan guru dan mekanisme

evaluasi berjenjang menyebabkan ketimpangan kualitas pengembangan kompetensi. Selain itu, keterbatasan regulasi dan transparansi dalam pelaporan keuangan masih menjadi hambatan bagi terciptanya tata kelola pembiayaan yang sepenuhnya adaptif dan berkeadilan. Realokasi dana lintas pos yang dilakukan untuk menutup kebutuhan mendesak menunjukkan bentuk adaptasi situasional, namun berpotensi mengurangi konsistensi terhadap rencana keuangan prioritas sekolah.

Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam konteks perubahan kurikulum sangat dipengaruhi oleh kemampuan sekolah menyeimbangkan antara fleksibilitas dan kepatuhan terhadap regulasi. SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara menunjukkan praktik manajemen yang adaptif dan kolaboratif dalam mengelola sumber dana, meskipun ruang inovasi masih terbatas oleh ketentuan kebijakan pusat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih fleksibel serta sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif agar sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola pembiayaan pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal dan dinamika perubahan kurikulum di masa depan.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang masih terbatas pada satu satuan pendidikan, yakni SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara. Pendekatan kualitatif studi kasus membuat hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi, melainkan untuk memberikan pemahaman kontekstual yang mendalam. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk melibatkan lebih banyak sekolah kejuruan di berbagai wilayah agar diperoleh gambaran komparatif tentang efektivitas manajemen pembiayaan pendidikan pada masa transisi kurikulum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, K. Y., & Astawa, I. G. P. B. (2023). Analisis Penggunaan Sistem Aplikasi Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (ARKAS) Terhadap Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 13(3), 359–367. <https://doi.org/10.23887/jiah.v13i3.62815>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Case Study Method in Qualitative Research. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Diah Kurniawati, N., Abas Mansur Tamam, & Hayyie Al Kattani. (2025). Uji Kelayakan Pengembangan Modul Pelatihan Kompetensi Kepribadian Dan Sosial Untuk Guru Pondok Pesantren. *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 6(1), 46–55. <https://doi.org/10.32832/jpg.v6i1.18015>
- Donkoh, S. (2023). Application of triangulation in qualitative research. *Journal of Applied Biotechnology & Bioengineering*, 10(1), 6–9. <https://doi.org/10.15406/jabb.2023.10.00319>
- Fahlupi, M. R., Yaqin, H., & Salabi, A. (2024). Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Islam Al Firdaus Banjarmasin. *ALACRITY: Journal of Education*, 4(2), 52–63. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v4i2.269>

- Fernandes, R. (2018). Adaptasi Sekolah Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusif. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 4(2), 119. <https://doi.org/10.24036/scs.v4i2.16>
- Findiana, F., & Bahar, H. (2023). Independent Education Funding Through Entrepreneurship-Based Curriculum At Islamic Education Institutions. *Proceeding of The Postgraduate School Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 1(September), 205–218. <https://doi.org/10.24853/pi.1.0.2023.205-218>
- Fransen, J., Hati, B., Simon, H. K., & van Stapele, N. (2024). Adaptive governance by community based organisations: Community resilience initiatives during Covid-19 in Mathare, Nairobi. *Sustainable Development*, 32(2), 1471–1482. <https://doi.org/10.1002/sd.2682>
- Haditsa, HQ, Isnani, IR, Harsing, H., Supiana, S., & Qiqi, Q. (2025). I. K. D. T. P. (PEMBELAJARAN M. E. : J. E. dan T. P. . (2025). INOVASI KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (DEEP LEARNING). *EduTeach : Jurnal Edukasi Dan Teknologi Pembelajaran* ., 6(02), 134–143. <https://doi.org/10.37859/eduteach.v6i02.9487>
- Harbes, B., Abdul Karim, H., Sesmiarni, Z., Armedo, M., & Salsabila, S. (2024). Perencanaan Pendidikan dan Manajemen Pembiayaan (Mewujudkan Peningkatan Mutu Secara Berkelanjutan). *Al-Marsus : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 128–141. <https://doi.org/10.30983/al-marsus.v2i2.8860>
- Intan, T. P., & Zulkarnain, Z. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Kejuruan Sukabumi. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(2), 156. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i2.8307>
- Lu, Y., Jian, M., Muhamad, N. S., & Hizam-Hanafiah, M. (2024). Data saturation in qualitative research: A literature review in entrepreneurship study from 2004–2024. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(12), 1–14. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i12.9753>
- Lutfi Zulfikar, A. (2023). Analisis Pengelolaan Dana BOSNAS dan BOSDA SMA Negeri di Kota Samarinda Terhadap Kinerja Keuangan Sekolah. *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 3, 1066–1077. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4793%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/4793/3479>
- Mahputriono, M. (2022). Determination of Education Quality and Graduate Quality: Funding and Curriculum Management Analysis. *Dinasti International Journal of Management Science*, 3(6), 1060–1068. <https://doi.org/10.31933/dijms.v3i6.1306>
- Margiati, D. A., Cahyani, C., Alfredo, F. R. D. P., & Anggraeni, B. (2025). Analisis Pengelolaan Dan Efektivitas Penggunaan Dana BOS Di Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 1 Kota Semarang. *JMIA Jurnal Ultidisciplin Ilmu Akademik*, 2(3), 507–512.
- Maskur, M. (2023). Dampak Pergantian

- Kurikulum Pendidikan Terhadap Peserta Didik Sekolah Dasar. *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 1(3), 190–203. <https://doi.org/10.61116/jkip.v1i3.172>
- Maya, A., Roemintoyo, & Kundari, R. (2021). Relevansi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan dengan. *Indonesian Journal Of Civil Engineering Education*, 7(1), 32–39.
- Mtisi, S. (2022). The Qualitative Case Study Research Strategy as Applied on a Rural Enterprise Development Doctoral Research Project. *International Journal of Qualitative Methods*, 21, 1–13. <https://doi.org/10.1177/16094069221145849>
- Murni, D., Sudirman, S., Waluyo, U., Asrin, A., & Fahrudin, F. (2023). Manajemen Pelaksanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah. (*JPAP Jurnal Praktisi Administrasi Pendidikan*), 7(2), 56–59. <https://doi.org/10.29303/jpap.v7i2.514>
- Musfirah, A. F., Nurlaila, N., & Nasution, Y. S. J. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Bos: Transformasi Melalui Penerapan Sistem Informasi Akuntansi UPT SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi. *Jesya*, 7(2), 1848–1863. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1717>
- Mutu, M., & Di, P. (2023). 314-Article Text-3199-1-10-20230829. 12(4), 2498–2505.
- Nover, F., Anwar Us, K., & Shalahudin, S. (2025). Konsep Dan Praktik Manajemen Pembiayaan Di Lembaga Pendidikan. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 5(1), 56–64. <https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.842>
- Nur Qolbi, M., & Susiawati, W. (2025). Kurikulum Merdeka: Kurikulum Berorientasi Masa Depan. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 6(1), 45–63. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v6i1.1320>
- Nurhaswinda, N., Maulina, S. R. M., Azzahra, A., Jannah, F., Jannah, N., Fadila, N. A., Harza, Z. J., & Hariza Putra, N. (2025). Penyajian Data. *LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren*, 3(1), 59–68. <https://doi.org/10.35870/ljit.v3i1.3709>
- Putri Nadia, Amelia Anwar, N. K. (2024). Implementasi dana komite sekolah, bosnas dan bosda terhadap peningkatan mutu pendidikan. *Fluralis*, 3(1).
- Ramadhani, M. A., & Rahayu, E. (2021). A Shift in Corporate Social Responsibility Program to Support Vocational Education in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 27(1), 26–36. <https://doi.org/10.21831/jptk.v27i1.32981>
- Rindawan, R., Irmansyah, J., Kurniawan, E., Yusuf, R., & Suriatno, A. (2024). Penguatan Kapasitas Guru Dalam Pembelajaran Berbasis Teknologi di Sekolah Dasar Se-Kecamatan Praya Barat Daya. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 6(3), 468–484. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v6i3.2043>
- Schlunegger, M. C., Zumstein-Shaha, M., & Palm, R. (2024). Methodologic and Data-Analysis Triangulation in

- Case Studies: A Scoping Review. *Western Journal of Nursing Research*, 46(8), 611–622. <https://doi.org/10.1177/01939459241263011>
- Soro, S. H., & Ambarawati, N. (2025). Effectiveness of School Operational Assistance Fund Management in Improving Learning Quality. *Global Education Journal*, 3, 541–548. <https://doi.org/10.59525/gej.v3i2.802>
- Sovita, I., & Rosa, M. L. (2022). Strategi Optimalisasi Peran Audit dalam Menciptakan Tata Kelola Dana BOS yang Akuntabel dan Transparan: Studi Literatur. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(1), 418–431.
- Wahyuni, S., & Destia Fahira, N. (2023). PROSES PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KESETARAAN PAKET C BAGI WARGA BINAAN LAPAS KELAS II A DAN WARGA BELAJAR DI PKBM MAHAKAM JAYA SAMARINDA. *Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM METRO*, 8(2). <https://doi.org/10.24127/jlpp.v8i2.3086>
- Wolff, K., Hattingh, T., & Smith, L. (2025). Global challenges, local responses: Exploring curriculum reform in South African engineering education. *Journal of Engineering Education*, 114(3), 1–23. <https://doi.org/10.1002/jee.70006>
- Wulaningsih, R., & Universitas, N. A. (2024). Pengelolaan Keuangan Pendidikan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Sumber Daya. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4, 1723–1732.
- Yadi, S., Nurrochim, N., & Ratnaningsih, S. (2023). Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Lembaga Pendidikan SIT Citra Az-Zahra. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(7), 748–756. <https://doi.org/10.59141/japendi.v4i7.2038>
- Yamamoto, Y., & Zubaidah, S. (2021). Peningkatan Profesional Guru Melalui Pendidikan Dan Latihan Di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 11(1), 38–47. <https://doi.org/10.33592/jiia.v11i1.1436>
- Zickafoose, A., Ilesanmi, O., Diaz-Manrique, M., Adeyemi, A. E., Walumbe, B., Strong, R., Wingenbach, G., Rodriguez, M. T., & Dooley, K. (2024). Barriers and Challenges Affecting Quality Education (Sustainable Development Goal #4) in Sub-Saharan Africa by 2030. *Sustainability (Switzerland)*, 16(7). <https://doi.org/10.3390/su16072657>